

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah kegiatan menciptakan atau memanfaatkan potensi daerah yang dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mengandung konotasi secara hierarkis berada dibawah pusat, karena pembangunan daerah dapat diartikan usaha meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan dengan kemampuan daerah dan nasional, dengan memanfaatkan kemampuan iptek serta memperhatikan perkembangan daerah, nasional dan global.

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor manapun dan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh pelosok tanah air.¹

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk dalam menggali sumber pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih atau tahu potensi yang dimilikinya.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:

¹Muhammad Hidayatullah, Skripsi: *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Murakata Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014), hlm 1.

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk publik”.

Pasal 18 yang menyatakan: “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU dengan memandang dan mengingat asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.²

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri.³ Allah berfirman dalam Q.S. al-A’raf/7: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (harapan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.⁴

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah Swt melarang manusia agar tidak membuat kerusakan dimuka bumi, seperti merusak sesama manusia, alam sekitar dan sebagainya. Bumi ini diciptakan oleh Allah Swt dengan segala

²Haw Widjaja. *Titik Berat Otonomi (Pada Daerah Tingkat II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hlm 29.

³*Politik dan Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm, 70.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang:CV Adi Grafika Semarang, 1994).

kelengkapan yang ditujukan untuk keperluan hidup manusia dimuka bumi demi kesejahteraan mereka. Maka dari itu manusia dilarang merusak sesamanya, maupun alam sekitarnya yang mampu menyambung kehidupannya. Anjuran untuk berbuat baik itu sudah tertanam dalam al-qur'an yang diwariskan oleh Allah Swt kepada Rasul-Nya yang terakhir yaitu Sayyidina Muhammad.

Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi didaerah masing-masing.

Menurut Halim (2004: 96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁵

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaram atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu dikelompokkan

⁵Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), hlm 23-24.

dalam retribusi atau jasa tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Jenis tiap-tiap retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶ Ditinjau dari segi hukum islam maka, retribusi salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat itu sendiri. Melalui firman Allah dibawah ini pada Q.S. an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu”.⁷

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan As-Sunnah.

Khusus mengenai retribusi daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Pada dasarnya dalam retribusi ada tiga hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Adanya pelayanan langsung diberikan sebagai imbalan kebebasan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.⁸

⁶Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hlm 3.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang:CV Adi Grafika Semarang, 1994).

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No 3 Tahun 2001 adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa peralatan dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.⁹

Penerimaan Daerah Kota Banjarmasin berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui salah satunya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Pengelolaan retribusi di Kota Banjarmasin sangat potensial, hal ini dikarenakan Kota Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan, perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 3 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi pasar telah ditugaskan pada Dinas Pengelolaan Pasar sebagai sistem satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 1.1 Penerimaan Retribusi Pasar Oleh Dinas Pengelolaan Pasar Tahun 2014-2017

Tahun	Retribusi Pasar	
	Target	Realisasi
2014	3.802.161.000	4.244.743.467
2015	8.114.237.544	8.336.238.620
2016	7.134.003.442	6.336.323.369
2017	6.773.136.614	3.774.303.409

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar 2017.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin yang masih

⁸Azhari A Samudera. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1995, hlm, 51.

⁹<http://padyangtaxcenter.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-retribusi-pasar.html?m=1>. (02 Desember : 22.41)

mengalami turun naik dari yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat jelas pada tabel diatas bahwa penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Khususnya pada tahun 2017 target dan yang terealisasi penerimaan retribusi pasar sebesar 3.774.303.409.

Dapat dilihat tabel dan penjelasan diatas penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan dan masih jauh dari angkat target yang telah ditetapkan. Ketika saya melakukan observasi awal melakukan wawancara di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar yang menyebabkan penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin tidak mencapai target ada beberapa hal:

1. Keberadaan online shop dari segi waktu,biaya, dan tenaga, bisnis ini seakan memanjakan pembeli, yang dapat berimbans negatif pada pasar offline karena dapat menyebabkan sepi pembeli dan pembeli lebih memilih belanja dengan cukup menggunakan internet.
2. Pegawai Retribusi Pasar belum tertib, maksudnya tertib dalam melakukan pengawasan dan ketetapan sanksi yang kurang tegas terhadap pedagang.
3. Penerimaan retribusi pasar juga mempengaruhi oleh keadaan cuaca, misalnya hujan akhirnya pembeli tidak ke pasar dan pasar sepi pembeli.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian tentang penerimaan retribusi pasar secara mendalam akan lebih menarik, terjadinya penerimaan retribusi pasar yang berfluktuasi dan tidak mencapai target, menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan RetribusiPasar Di Kota Banjarmasin.

¹⁰Tasrin Mulyadi, Kasubbag TU UPTD III Dinas Pengelolaan Pasar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 5 Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel kesadaran pedagang, kerajinan petugas retribusi, bukti pemanfaatan retribusi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin?
2. Apakah variabel kesadaran pedagang, kerajinan petugas retribusi, bukti pemanfaatan retribusi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin?
3. Manakah variabel yang paling dominan antara kesadaran pedagang, kerajinan petugas retribusi, bukti pemanfaatan retribusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh simultan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan antara Kesadaran Pedagang, Kerajinan Petugas Retribusi, Bukti Pemanfaat Retribusi.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dibangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kejadian selanjutnya yang menarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.

c. Bagi Kampus

Manfaat penelitian ini bagi Universitas yaitu dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahannya yang akan peneliti teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat defisi operasional sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi adalah jalannya suatu proses pengelolaan retribusi pasar pada kantor Dinas Pengelolaan Pasar di Kota Banjarmasin dapat beroperasi dengan tiga indikator sebagai berikut:

a. Kesadaran Pedagang

Kesadaran pedagang membayar retribusi dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

b. Kerajinan Petugas Retribusi

Kerajinan petugas retribusi merupakan fondasi untuk membangun kinerja dan prestasi kerja yang baik. Kerajinan sebuah nilai yang harus dijadikan fondasi dalam bekerja, agar pekerjaan yang dikerjakan itu berkualitas tinggi dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

c. Bukti Pemanfaatan Retribusi

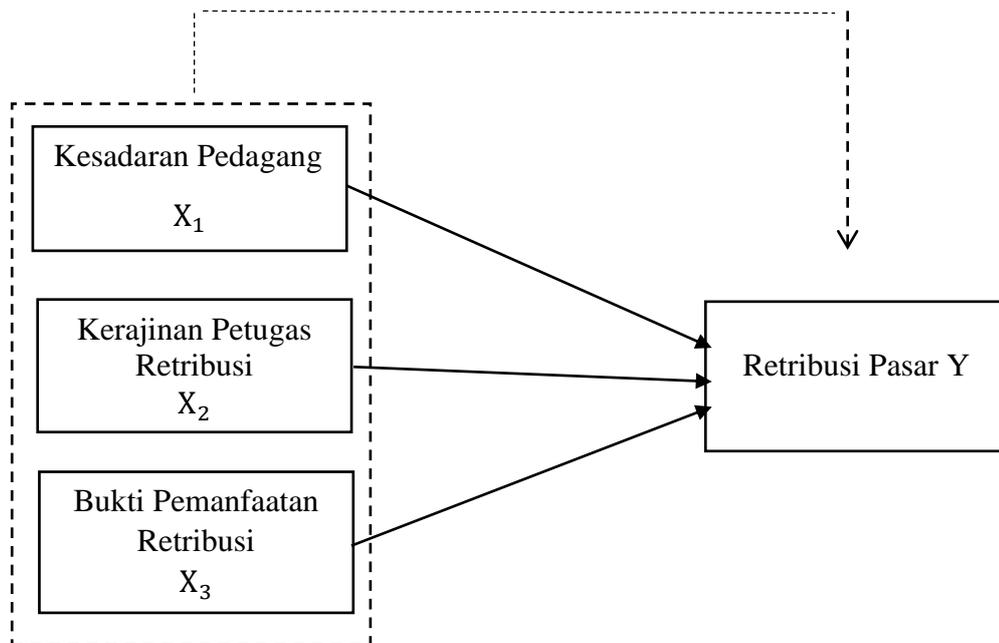
Bukti pemanfaatan retribusi merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk pedagang yang dikenakan biaya retribusi pasar.

2. Penerimaan retribusi pasar adalah penerimaan yang dipungut dari pedagang pasar, yang diukur dengan angka dalam rupiah pertahun.¹¹
3. Retribusi pasar adalah salah satu jenis retribusi jasa umum yang dikelola pemerintah dan untuk dimanfaatkan oleh pedagang yang dibebankan untuk membayar retribusi pasar.
4. Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin yang dijuluki Kota *Seribu Sungai* ini memiliki wilayah seluas

¹¹Tasrin Mulyadi, Kasubbag TU UPTD III Dinas Pengelolaan Pasar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 5 Desember 2017.

98,46 km² yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekisar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai.¹²

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Ket: \longrightarrow : Berpengaruh secara Parsial
 \dashrightarrow : Berpengaruh secara Simultan

Sumber: Kesadaran Pedagang: Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm, 462-463.

Sumber: Petugas Retribusi : Budi Safa'at, *99 Perbedaan Pikir Pengusaha Vs Karyawan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2017), hlm 123 dan Syaiful Sagala. *Human Capital Membangun Modal Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Kualitas*, (Depok: Kencana, 2017), cet 1, hlm 168.

Sumber: Bukti Pemanfaatan Retribusi : Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm, 296.

Sumber: Retribusi Pasar : Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 433- 449.

¹²Badan Pusat Statistik, "Kota Banjarmasin Dalam Angka," (Banjarmasin: CV Karya Bintang Musim), 2017, hlm 4-6.

G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis I

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel kesadaran pedagang, kerajinan pedagang, bukti pemanfaatan retribusi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel kesadaran pedagang, kerajinan pedagang, bukti pemanfaatan retribusi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

Hipotesis II

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara kesadaran pedagang, kerajinan pedagang, bukti pemanfaatan retribusi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara kesadaran pedagang, kerajinan pedagang, bukti pemanfaatan retribusi terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin.

H. Kajian Pustaka

1. Ellyta Z Saragih (Nim : 3353404015) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Tahun 2009 dengan judul “Retribusi Pasar Gayamsari, Karangayu dan Rejumolyo Kota Semarang”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil adalah potensi dari retribusi pasar gayamsari pada tahun 2007 sebesar Rp 299.667.000, Karangayu sebesar Rp 452.122.500 dan Rejomulyo sebesar Rp 656.617.200. potensi ketiga pasar ini belum terealisasi secara penuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pasar Gayamsari adalah jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas yang baik, terpeliharanya kebersihan. Pasar Karangayu dipengaruhi oleh jumlah fasilitas dan kondisi fasilitas yang kurang baik dan bertumbuhnya pasar-pasar swalayan disekitar pasar. Pasar Rejomulyo dipengaruhi oleh faktor alam yaitu banjir dan letak pasar.

Faktor pendukung dalam memungut retribusi pasar gayamsari adalah terjalinnya hubungan yang baik antara petugas dan pedagang, kepedulian pedagang serta tersedianya sarana dan prasarana. Pasar Karangayu adalah ketaatan petugas dalam melaksanakan tugas, ketaatan pedagang yang menempati kios dan los. Pasar Rejomulyo adalah semangat petugas dan merupakan kewajiban pedagang. Kendala yang dihadapi ketiga pasar ini sama yaitu dari faktor petugas dan faktor pedagang. Upaya yang dilakukan untuk mengetahui kendala adalah pembinaan terhadap petugas dan pedagang. Mengacu pada hasil penelitian maka disarankan kepada pengelola Pasar Gayamsari mendata pedagang dengan benar sehingga memudahkan petugas dalam menagih tunggakan, kepada petugas pemungut retribusi agar mempertahankan hubungan dengan pedagang melalui pendekatan. Untuk Pasar Karangayu, melakukan pendekatan terhadap pedagang dan memberi wacana kepada pedagang tentang pentingnya pajak.

Untuk Pasar Rejomulo, memberikan pembinaan terhadap pedagang agar mau membayar retribusi sesuai dengan tarif yang berlaku.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, peneliti ini lebih fokus pada kurangnya optimal pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan kurang efektif pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini juga meneliti tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dan upaya untuk menangani kendala pemungutan retribusi pasar.¹³

2. Masdalina (Nim: 1301150153) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2017 dengan “Judul Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar melalui pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin telah berupaya memberikan pengelolaan secara maksimal bisa dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor pendorong dalam pengelolaan retribusi pasar adalah dengan melakukan tevitalisasi pasar baik dalam segi pembenahan pasar, kebersihan, parkir, dan fasilitas lainnya. Sedangkan, yang menjadi faktor penghambat pengelolaan retribusi pasar ini antara lain masih banyak pedagang yang menunggak pembayaran, faktor cuaca, tidak adanya fasilitas pendukung bagi petugas pemungut dan ketidak mahiran petugas dalam berinteraksi dengan pedagang. Sedangkan kontribusi

¹³Ellyta Z Suragih, Skripsi: Retribusi Pasar Gayamsari, Karangayu dan Rejomulyo Kota Semarang, (Semarang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Universitas Negeri Semarang, 2009), <http://lib.unnes.ac.id/2401/>di akses pada 02 Desember 2017.

penerimaan retribusi pasar Kota Banjarmasin selama tiga tahun terakhir yaitu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 16.141.900.311,00 dengan rata-rata sebesar Rp 5.380.633.473,00 pertahun 3.266.666.666,00 dan 21,1%. Walaupun masih terlihat kecil tapi setiap tahunnya hampir selalu mengalami peningkatan dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan retribusi pasar Kota Banjarmasin berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti ini lebih terfokus pada pengelolaan Dinas Pasar untuk mengoptimalkan retribusi pasar dan berupaya memperoleh pemanfaatan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya, peneliti ini meneliti dengan tempat yang sama di Dinas Pengelolaan Pasar Banjarmasin.¹⁴

3. Hasan Basri (Nim : 1101150147) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2015 dengan Judul “Retribusi Jasa Pasar Dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin”.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pengelolaan retribusi jasa pasar di Kota Banjarmasin sudah dapat berjalan cukup baik termasuk realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin, dimana seluruh hasil retribusi pasar akan masuk ke kas daerah dan apabila ada sarana dan

¹⁴Masdalina, Skripsi: Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017), <http://idr.uin-antasari.ac.id> diakses pada 02 Desember 2017.

prasarana yang perlu perbaikan tinggal mengajukan permohonan dana. Pada tahun 2015, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin melakukan perbaikan dan revitalisasi terhadap pasar 15 dan merevitalisasi 2 pasar tradisional. Selain itu, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin juga memberikan bimbingan teknis kepada para pedagang bersama para pengelola pasar tradisional tentang cara berjualan dengan baik, seperti mengupayakan dan memelihara kebersihan pasar, cara berdagang dengan baik seperti penataan barang dagangan yang menarik pembeli dan pengelolaan pasar.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya, peneliti ini lebih terfokus pada membenahan pada pasar tradisional dan rencana pembangunan pasar induk ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tolak ukur bagi perkembangan suatu daerah.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya, peneliti ini membahas tentang retribusi pasar dan tempat penelitian di Dinas Pengelolaan Pasar.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

¹⁵Hasan Basri, Skripsi: Retribusi Jasa Pasar Dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin. (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), <http://idr.uin-antasari.ac.id> diakses pada 02 Desember 2017.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini mengarahkan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya latar belakang masalah yaitu penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan dan masih jauh dari angkat target yang telah ditetapkan dan penyebab rendahnya terealisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Banjarmasin, rumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan dan dengan pertanyaan ini dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya, tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan dan manfaat penelitian, definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian serta memperjelas permasalahan yang penulis angkat, kajian pustaka ini semua jenis referensi jenis buku dan semua referensi ditulis dalam kajian pustaka, hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya, kerangka pemikiran ini dikemukakan apabila didalamnya ada berkenaan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan dan sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara bergaris besar terdiri dari bagian awal, isi dan akhir.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Pasar yang didukung dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menjadi dasar pemikiran dan mencari pembuktian dan solusi yang tepat.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang

berisi jenis dan pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, desain pengukuran menggunakan instrumen skala likert. Kemudian data di analisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian. Meliputi data gambaran Kota Banjarmasin, retribusi pasar di Kota Banjarmasin, data identitas responden, data tanggapan responden terhadap pernyataan kesadaran pedagang, kerajinan petugas retribusi, bukti pemanfaatan retribusi, pengujian hipotesis melalui analisis yang digunakan dan pembahasan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari simpulan dari hasil penelitian yang sesuai dengan pertanyaan di rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengotimalkan petugas pemungut retribusi pasar dan kepada peneliti selanjutnya dapat memperbanyak variabel dan memperjelas penelitian khususnya mengenai “Kajian Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Banjarmasin”.